



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

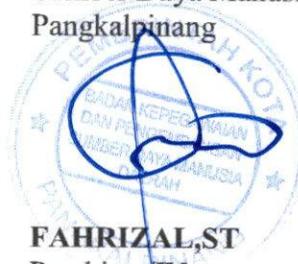
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang. Renja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Atas tersusunnya Renja Perubahan Tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukanya. Semoga Renja Perubahan Tahun 2023 ini nantinya dapat menjadi bahan dalam penetapan Rencana Kerja (Renja) Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023.

Pangkalpinang, 28 Agustus 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang



FAHRIZAL,ST
Pembina IVa
NIP. 198502062008041001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

- Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 22);
 23. Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah memberikan informasi tentang rencana program kegiatan perangkat daerah anggaran perubahan tahun 2023. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah sebagai acuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023, meliputi :

- BAB I Pendahuluan
- Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
- Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Triwulan II dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023
- BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra BKPSDMD Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) serta memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 melaksanakan 3 (Tiga) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) sub kegiaatn dengan total anggaran sebesar Rp. 5.815.862.188,- (Lima Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Delapan puluh Delapan Rupiah). Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

TRIWULAN II
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pangkalpinang Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					6		7		8		9		10		11		12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	050301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	4.146.033.836	25	707.513.224	50	1.203.744.538	0	0	0	0	50	1.911.257.762	50	46,098	Sekretariat
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		25		50		0	0		50			50		Sekretariat
				Persentase sarana dan prasarana Apratur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		25		50		0	0		50			50		Sekretariat
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kuallifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		25		50		0	0		50			50		Sekretariat
2		050301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	3.312.199.673	0	560.727.973	0	1.055.596.475	0	0	0	0	0	1.616.324.448	0	48,799	Kasubbag PEP dan Keuangan
3		050301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	34	3.312.199.673	29	560.727.973	29	1.055.596.475	0	0	0	0	29	1.616.324.448	85,294	48,799	Kasubbag PEP dan Keuangan
4		050301205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	10.000.000	0	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	0	58,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					6		7		8		9		10		11		12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5		050301205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	2	10.000.000	2	5.800.000	2	0	0	0	0	2	5.800.000	100	58,000	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	
6		050301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	309.874.720	0	84.949.989	0	72.486.177	0	0	0	0	157.436.166	0	50,806	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
7		050301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5.000.000	0	0	1	1.088.000	0	0	0	1	1.088.000	100	21,760	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
8		050301206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	3.000.000	0	0	1	400.000	0	0	0	1	400.000	50	13,333	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
9		050301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	80.174.720	0	0	1	10.600.720	0	0	0	1	10.600.720	50	13,222	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
10		050301206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	46.700.000	0	0	1	12.746.000	0	0	0	1	12.746.000	50	27,293	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
11		050301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	175.000.000	0	84.949.989	0	47.651.457	0	0	0	0	132.601.446	0	75,772	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
12		050301207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Dengan Satuan:laporan)	1	96.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
13		050301207007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	96.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					6		7		8		9		10		11		12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
14		050301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	269.662.851	0	44.598.146	0	55.110.712	0	0	0	0	0	99.708.858	0	36,975	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
15		050301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	85.600.000	0	20.176.450	0	4.859.668	0	0	0	0	0	25.036.118	0	29,248	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
16		050301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	24.998.675	0	0	0	6.200.000	0	0	0	0	0	6.200.000	0	24,801	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
17		050301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	159.064.176	0	24.421.696	0	44.051.044	0	0	0	0	0	68.472.740	0	43,047	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
18		050301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara (Dengan Satuan:Laporan)	3	147.946.592	0	11.437.116	0	20.551.174	0	0	0	0	0	31.988.290	0	21,622	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
19		050301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	39.773.296	1	1.630.500	1	4.520.000	0	0	0	0	1	6.150.500	100	15,464	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
20		050301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	4	58.400.000	4	6.428.000	4	9.963.250	0	0	0	0	4	16.391.250	100	28,067	Kasubbag Umum dan Kepegawalan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
21		050301209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	49.773.296	0	3.378.616	0	6.067.924	0	0	0	0	0	9.446.540	0	18,979	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																50,000	46,098		
PREDIKAT KINERJA																SR	SR		
22	-	050302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan:%)	7,800	815.887.352	5,700	86.307.544	6,800	197.340.316	0	0	0	0	6,800	283.647.860	87,179	34,766	Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	100		21		26		0	0	0	26		26		Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan:%)	100		35		61		0	0	0	61		61		Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	
23		050302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN (Dengan Satuan:Laporan)	7	396.370.264	0	39.007.544	0	131.040.316	0	0	0	0	0	170.047.860	0	42,901	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
24		050302201002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	2	17.700.000	0	0	1	7.404.000	0	0	0	0	1	7.404.000	50	41,831	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
25		050302201003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dengan Satuan:Dokumen)	193	10.000.000	159	1.600.000	193	7.525.000	0	0	0	0	193	9.125.000	100	91,250	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
26		050302201006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	110	10.000.000	32	0	52	0	0	0	0	52	0	47,273	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian	
27		050302201008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	1	51.000.000	0	0	1	51.000.000	0	0	0	1	51.000.000	100	100	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	
28		050302201009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	3.000	244.820.264	962	37.407.544	1.500	65.111.316	0	0	0	1.500	102.518.860	50	41,875	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	
29		050302201010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	30	25.350.000	7	0	11	0	0	0	0	11	0	36,667	0	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	
30		050302201011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	5	37.500.000	1	0	2	0	0	0	0	2	0	40	0	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	
31		050302202	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan:Laporan)	3	186.930.000	0	47.300.000	0	60.400.000	0	0	0	0	107.700.000	0	57,615	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian	
32		050302202001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	25	107.670.000	19	38.500.000	25	47.500.000	0	0	0	25	86.000.000	100	79,874	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian	
33		050302202002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	600	36.860.000	424	7.200.000	424	10.900.000	0	0	0	424	18.100.000	70,667	49,105	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab												
							I		II		III		IV																		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp										
34		050302202003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	50	42.400.000	147	1.600.000	242	2.000.000	0	0	0	0	242	3.600.000	100	8,491	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian												
35		050302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN (Dengan Satuan:Laporan)	3	177.587.088	0	0	0	4.100.000	0	0	0	0	0	4.100.000	0	2,309	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan												
36		050302203001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	125	60.000.000	0	0	23	0	0	0	0	23	0	18,400	0	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan													
37		050302203004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	5	104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi												
38		050302203014	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Dengan Satuan:Orang)	30	13.587.088	30	0	180	4.100.000	0	0	0	0	180	4.100.000	100	30,176	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan												
39		050302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur (Dengan Satuan:laporan)	3	55.000.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	0	3,273	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi												
40		050302204002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	3.000	20.000.000	650	0	1.192	0	0	0	0	1.192	0	39,733	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi													
41		050302204004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	150	20.000.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0	9	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan													
42		050302204008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	5	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						58,060	34,766								
PREDIKAT KINERJA																															

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
43	-	050402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi (Dengan Satuan:%)	79	853.941.000	20	103.227.619	20	76.757.144	0	0	0	0	20	179.984.763	25,316	21,077	Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
44		050402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah laporan pengembangan kompetensi teknis (Dengan Satuan:Laporan)	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
45		050402201003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	50	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
46		050402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:Laporan)	1	753.941.000	0	103.227.619	0	76.757.144	0	0	0	0	0	179.984.763	0	23,873	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
47		050402202007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	753.941.000	0	103.227.619	0	76.757.144	0	0	0	0	0	179.984.763	0	23,873	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																25,316	21,077		
PREDIKAT KINERJA																SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																49,937	33,980		
PREDIKAT KINERJA																SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan dan pelaksanaan pencairan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan															

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
						7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Pelaksanaan sub kegiatan dilaksanakan pada Triwulan ke III															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				- Melaksanakan proses penilaian anggaran sub kegiatan sesuai dengan dijadwalkan															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				- Melaksanakan proses pencairan anggaran sub kegiatan sesuai dengan dijadwalkan															

KOTA PANGKALPINEA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Analisis kinerja pelayanan BKPSDMD Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kepegawaian merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan”**, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
2. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, maka dapat diuraikan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					1067	1396	1388	83.6	BKPSDMD
						341	1692	1660		
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99	359	359	21.6	
						1408	1692	1660		
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99	161	170	47.3	
						99	359	359		

NO	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	100	100	100%	100%	82.5%	100	100	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			7.04	7.03	7.07	7.03	7.05%	23,40%	21.2%	7.07	7.03	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	100	100	100%	36%	44.8%	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi BKPSDMD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu strategis di bidang kepegawaian, adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan penempatan ASN yang disesuaikan dengan kompetensi Jabatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan formasi jabatan fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Selain isu-isu penting di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD antara lain :

Permasalahan :

1. Aparatur Sipil Negara tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi).
2. Ketidaksihesuaian pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja terhadap jabatan.
3. Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi dan pendidikan dan pelatihan formal kepada seluruh pegawai dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Promosi terbuka hanya terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
5. Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja.
6. Absensi belum terintegrasi dengan sistem pembayaran tunjangan kinerja pegawai
7. Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik.
8. Arsip data pegawai dari PNS masih belum masuk semuanya ke BKPSDMD.

Penghambat :

1. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian belum optimal.
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.

Pendorong :

1. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
2. Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat.
3. Adanya kewenangan dalam manajemen dibidang kepegawaian.

Kekuatan :

Sedangkan kekuatan (*strenght*) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur.
2. Kemauan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya semangat belajar dari sumber daya aparatur.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	2			4	5	6	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4,736,088,156	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4,736,088,156		
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Laporan	1	3,602,458,993	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Laporan	1	3,602,458,993	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	3,602,458,993	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	3,602,458,993	
		Terpenuhinya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	100			Terpenuhinya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	2			4	5	6	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	2	88,250,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	2	88,250,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket	3	63,250,000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket	3	63,250,000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan	Orang	5	25,000,000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	5	25,000,000	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Laporan	5	378,756,720	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Laporan	5	378,756,720	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5,459,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5,459,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3,459,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3,459,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	2			4	5	6	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	90,368,720	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	90,368,720	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	54,470,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	54,470,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	225,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	225,000,000	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	236,759,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	236,759,000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	23	236,759,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	23	236,759,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	2			4	5	6	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	271,039,851	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	271,039,851	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	86,059,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	86,059,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	25,457,675	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	25,457,675	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	159,523,176	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	159,523,176	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	2			4	5	6	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan	3	158,823,592	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan	3	158,823,592	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40,232,296	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40,232,296	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	68,359,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	68,359,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50,232,296	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50,232,296	
	KEPEGAWAIAN					KEPEGAWAIAN					
	Program Kepegawaian Daerah				1,458,244,764	Program Kepegawaian Daerah				1,458,244,764	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	2			4	5	6	
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100			
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Laporan	7	891,131,764	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah laporan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Laporan	7	891,131,764		
	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Dokumen	2	270,053,500	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2	270,053,500		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	322	32,499,000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	322	32,499,000		
	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Dokumen	110	10,359,000	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	110	10,359,000		
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Lembaga	1	240,541,000	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	240,541,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	2			4	5	6	
Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Dokumen	3,000	259,820,264	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Dokumen	3,000	259,820,264		
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	30	25,359,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	30	25,359,000		
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	5	52,500,000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	5	52,500,000		
	Rasio pegawai fungsional	%	7.8			Rasio pegawai fungsional	%	7.8			
Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan mutasi dan promosi ASN	Laporan	3	313,577,000	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan mutasi dan promosi ASN	Laporan	3	313,577,000		
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	40	192,399,000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	40	192,399,000		
Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	600	68,319,000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	600	68,319,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	2			4	5	6	
	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	280	52,859,000	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	280	52,859,000	
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100		
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN	Laporan	3	156,863,000	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN	Laporan	3	156,863,000	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang	125	75,059,000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang	125	75,059,000	
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	5	57,770,000	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	5	57,770,000	
	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	200	24,034,000	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	200	24,034,000	
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%				Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%			
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	Laporan	3	96,673,000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	Laporan	3	96,673,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
				1	2				3	4	
	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	3,000	35,000,000	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	3,000	35,000,000	
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	150	40,189,000	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	150	40,189,000	
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	5	21,484,000	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	5	21,484,000	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				1,083,302,000	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				1,083,302,000	
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%	79			Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%	79		
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah laporan pengembangan kompetensi Teknis	Laporan	1	192,770,000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah laporan pengembangan kompetensi Teknis	Laporan	1	192,770,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	2			4	5	6	
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	80	192,770,000	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	80	192,770,000	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Laporan	1	890,532,000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Laporan	1	890,532,000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	Laporan	1	890,532,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	Laporan	1	890,532,000	
				7,277,634,920					7,277,634,920		

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima (5) tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu :

“Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)”

3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu :

“Terlaksananya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi”

Tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Jangka Menengah					Kondisi Akhir RPJMD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59,07	59,11	61,39	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50
			Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)		Persentase ASN yang disiplin	Nilai	96.50	96.50	97.00	97.00	97.00	98.50	99.00	99.00
				Terlaksananya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	%	75	76	77	78	78	79	80	80

Tabel 3.2
Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	%	47,76	53,29	58,82	64,35	69,88	75,41	80,94	80,94	BKPSDMD
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	54,15	54,69	55,37	61,50	67,62	78,50	95,51	95,51	
Indeks Reformasi Birokrasi sub komponen penataan sistem manajemen SDM	Nilai	NA	NA	61,50	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50	
Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	NA	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	
Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	%	NA	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					1067 341	1396 1692	1388 1660	83.6	BKPSDMD
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 1408	359 1692	359 1660	21.6	
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 99	161 359	170 359	47.3	
Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%					77	78	79	79	

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi misi. Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan. Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program dijabarkan dalam 12 (Dua Belas) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program

Pada Tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang terdiri dari:
 - Program Kepegawaian Daerah
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Program Pendukung, yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Rencana Kegiatan

1. Kegiatan Prioritas
 - 1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.
 - b. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - c. Fasilitasi lembaga profesi ASN
 - d. Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN
 - e. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
 - f. Pengelolaan data kepegawaian
 - g. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan mutasi ASN
 - b. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 - c. Pengelolaan promosi ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
 - b. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
 - c. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
 - 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 - b. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
 - c. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
- 5) Pengembangan Kompetensi teknis, dengan sub kegiatan :
- a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.
- 6) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan :
- a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.
2. Kegiatan Pendukung
- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 4) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan aset tetap lainnya
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
5	03		KEPEGAWAIAN																	4,961,921,188	6,194,332,920		4,903,641,188	
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	4,146,033,836	4,736,088,156		4,085,713,500	
5	03	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	3,312,199,673	3,602,458,993		3,077,313,500
5	03	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	34 Orang/bulan	30 Orang/bulan	Laporan	1 Laporan	3,312,199,673	3,602,458,993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,077,313,500			
5	03	01	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	10,000,000	88,250,000		48,000,000
5	03	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	3 paket	2 Laporan	2 Laporan	0	63,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	38,000,000			
5	03	01	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Orang	5 Orang	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	10,000,000			
5	03	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	309,874,720	378,756,720		357,000,000
5	03	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	5,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000			
5	03	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	5 Laporan	5 Laporan	3,000,000	3,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000			
5	03	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	3 Paket	5 Laporan	5 Laporan	80,174,720	90,368,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	82,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 03 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	46,700,000	54,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000			
5 03 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	175,000,000	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000			
5 03 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											96,350,000	236,759,000			100,000,000				
5 03 01 2.0 7 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	23 Unit	1 Laporan	1 Laporan	96,350,000	236,759,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000			
5 03 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											269,662,851	271,039,851			330,000,000				
5 03 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	85,600,000	86,059,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	130,000,000			
5 03 01 2.0 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	24,998,675	25,457,675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	35,000,000			
5 03 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	159,064,176	159,523,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	165,000,000			
5 03 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											147,946,592	158,823,592			173,400,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	39,773,296	40,232,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	40,000,000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	3 Laporan	3 Laporan	58,400,000	68,359,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	58,400,000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	49,773,296	50,232,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	75,000,000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											815,887,352	1,458,244,764			817,927,688		
5.03.02.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											396,370,264	891,131,764			398,410,600		
5.03.02.1.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	17,700,000	270,053,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	17,700,000	
5.03.02.1.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	193 Dokumen	322 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	10,000,000	32,499,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	10,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	110 Dokumen	110 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	10,000,000	10,359,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	10,000,000	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	7 Laporan	7 Laporan	51,000,000	240,541,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	51,000,000	
5.03.02.2.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3000 Dokumen	3000 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	244,820,264	259,820,264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	246,860,600	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Dokumen	30 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	25,350,000	25,359,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	25,350,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5.03.02.1.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	37,500,000	52,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	37,500,000	
5.03.02.2	Mutasi dan Promosi ASN											186,930,000	313,577,000			186,930,000		
5.03.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Rasio Pegawai Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN		7,8 %	7,8 %	25 Dokumen	40 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	107,670,000	192,399,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio Pegawai Fungsional	7,8 %	107,670,000	
5.03.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rasio Pegawai Fungsional	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN		7,8 %	7,8 %	600 Dokumen	600 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	36,860,000	68,319,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio Pegawai Fungsional	7,8 %	36,860,000	
5.03.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Rasio Pegawai Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN		7,8 %	7,8 %	50 Dokumen	280 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	42,400,000	52,859,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio Pegawai Fungsional	7,8 %	42,400,000	
5.03.02.3	Pengembangan Kompetensi ASN											177,587,088	156,863,000			177,587,088		
5.03.02.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN		100 %	100 %	125 Orang	125 Orang	3 Laporan	3 Laporan	60,000,000	75,059,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	60,000,000	
5.03.02.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN		100 %	100 %	5 Orang	5 Orang	3 Laporan	3 Laporan	104,000,000	57,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	104,000,000	
5.03.02.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN		100 %	100 %	30 Orang	200 Orang	3 Laporan	3 Laporan	13,587,088	24,034,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	13,587,088	
5.03.02.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											55,000,000	96,673,000			55,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5.03.02.4.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur		100 %	100 %	3000 Dokumen	3000 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	20,000,000			
5.03.02.4.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur		100 %	100 %	150 Orang	150 Orang	3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	40,189,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	20,000,000			
5.03.02.4.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur		100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15,000,000	21.484,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	15,000,000			
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										853,941,000	1,083,302,000				1,100,000,000			
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										853,941,000	1,083,302,000				1,100,000,000			
5.04.02.1		Pengembangan Kompetensi Teknis										100,000,000	192,770,000				100,000,000			
5.04.02.1.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah Laporan pengembangan kompetensi teknis		79 %	79 %	50 Orang	80 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	192,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79 %	100,000,000			
5.04.02.2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										753,941,000	890,532,000				1,000,000,000			
5.04.02.2.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		79 %	79 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	753,941,000	890,532,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79 %	1,000,000,000			
TOTAL												5,815,862,188	7,277,634,920				6,003,641,188			

BAB V PENUTUP

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan Rencana Kerja Perubahan Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023. Dalam Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program dijabarkan dalam 12 (Dua Belas) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) sub kegiatan.

Sebagai penutup, apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai OPD pengelola kepegawaian Kota Pangkalpinang.